

TAK BISA LAGI ADA DI PUSAT KOTA

## Bima Arya Bakal Pindah Lokasi Pasar di Bogor

**JAKARTA (IM)** - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor akan memindahkan lokasi pasar yang ada di Kota Bogor. Wali Kota Bogor, Bima Arya mengatakan pasar tak boleh lagi ada di pusat kota karena bisa menimbulkan kemacetan lalu lintas. "Jadi gini, tidak bisa lagi di pusat Kota Bogor ada pasar tradisional, nggak bisa lagi. Karena nggak sesuai dengan tata kota ke depan. Itu pusat kemacetan, pusat kesemrawutan," kata Bima di Balai Kota Bogor, Selasa (10/1).

"Jadi harus bergeser konsepnya. Ini yang sekarang sedang dirumuskan, konsepnya seperti apa. Yang pasti itu nanti jadi pusat destinasi utama di Kota Bogor," tambahnya.

Salah satu yang bakal dipindah adalah para pedagang di Plaza Bogor yang terletak di kawasan Pasar Bogor, Jalan Surya Kencana, Kota Bogor. Gedung Plaza Bogor yang kini ditempati para pedagang pakaian dan makanan itu akan dibongkar.

Bima mengatakan Plaza Bogor dan sekitarnya akan disulap menjadi ruang terbuka hijau dan fasilitas parkir bagi warga. Dia mengatakan relokasi pasar harus dilakukan agar Kota Bogor tidak semrawut.

"Intinya ini tidak boleh menjadi pasar karena ini di pusat kota, ini tidak cocok lagi. Nanti akan semrawut akan macet. Kemudian ada bangunan parkir juga ada fasilitas untuk parkir juga. Ada ruang terbuka hijau juga, jadi nanti ada ruang terbuka ada untuk UMKM, intinya konsepnya itu tidak sama lagi. Konsepnya itu bukan untuk pasar basah berbelanja bukan. Tapi konsep yang lebih rapi lah," katanya.

Bima menyebutkan para pedagang akan direlokasi ke beberapa pasar lain, seperti Pasar Kebon Kembang, Pasar Anyar, Pasar Merdeka, Pasar Jambu Dua, dan Pasar Sukasari. Dia berjanji akan mengajak dialog para pedagang soal kapan relokasi dilakukan.

"Pedagangnya pasti direlokasi, sudah siap kok semua, ada beberapa opsi untuk relokasi. Jadi semua akan direlokasi ke tempat yang lebih tepat, tidak di pusat kota sekali seperti itu, karena akses lalu lintasnya sulit di situ," ucap Bima.

"Nanti saya akan dialog dengan pedagang, (relokasi) tahun ini sudah pasti, tapi apakah setelah lebaran atau sebelum lebaran, saya mau dialog lagi dengan pedagang," sambungnya. ● **gio**

## Perayaan Imlek di Solo, Ada Pesta Kembang Api Selama 25 Menit

**SOLO (IM)** - Perayaan tahun baru Imlek 2574/2023 di Kota Solo akan sedikit berbeda dengan dua tahun lalu. Tahun baru Imlek 2023 akan bertabur pesta kembang api selama 25 menit. Pesta kembang api ini rencananya akan mulai dinyalakan pada Sabtu (21/1) malam tepatnya pukul 00.00 WIB di Plaza Balai Kota Solo sampai Minggu (22/1) pukul 00.25 WIB.

Ketua Panitia Bersama Imlek 2023 Solo, Sumartono Hadinoto mengatakan pesta kembang api ini baru yang pertama setelah dua tahun ditiadakan karena pandemi Covid-19. Sebelum kembang api dinyalakan, kata Sumartono, akan diawali dengan atraksi liong barongsai dari berbagai perkumpulan di Solo. "Kembang apinya kita nyalakan pada malam tahun baru Imlek tanggal 21 Januari di mana sebelumnya ada atraksi liong barongsai dari berbagai perkumpulan di Solo di Plaza Balai Kota," kata Sumartono di Solo, Jawa Tengah, Selasa (10/1).

Menurut dia, panitia menghabiskan dana sekitar Rp 50 juta untuk pesta kembang api pada perayaan tahun baru Imlek. "Durasinya (kembang api) 20-25 menit," ungkap Sumartono. Selain pesta kembang api, panitia juga telah memasang 5.000

lampion. Baik lampion merah dan kuning, lampion 12 shio, lampion kelinci maskot, lampion dewa rezeki, lampion barongsai, lampion jaleyhud, hingga lampion lilin.

Selain itu dipasang juga gapura Imlek di seputar Pasar Gede, Jalan Jenderal Sudirman, dan Jalan Urip Sumoharjo. Lampion-lampion ini sudah dinyalakan sejak tanggal 5 Januari 2023 dan berlangsung hingga 10 Februari 2023.

Puncak perayaan tahun baru Imlek akan jatuh pada tanggal 5 Februari 2023 yakni Cap Go Meh. Perayaan ini akan dilaksanakan bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Solo di Pendapi Gede kompleks Balai Kota Solo pada Minggu (5/2). "Tanggal 4 Februari ada kirab liong barongsai keliling di jalan-jalan Solo. Kirab kita ajukan sehari dari Cap Go Meh karena tanggal 5 jatuh hari Minggu. Tapi perayaan Imlek tetap tanggal 5 di Pendapi Gede Solo," jelasnya.

Lebih jauh pihaknya berharap keberadan lampion-lampion Imlek ini mendatangkan pengunjung atau wisatawan tidak hanya dari dalam, tapi dari luar daerah termasuk luar negeri. ● **pra**

IDN/ANTARA



### KERAJINAN KERANJANG ANYAMAN RUMPUT MENDONG

Perajin menyelesaikan keranjang anyaman rumput mendong (*Fimbristylis umbellaris*) di Dukuh Kowang, Ngargotirto, Sumberlawang, Sragen, Jawa Tengah, Selasa (10/1). Kerajinan keranjang anyaman mendong dengan memberdayakan warga sekitar tersebut mampu menembus pasar ekspor ke Singapura, Uni Emirat Arab hingga Korea Utara dan dijual Rp350 ribu hingga Rp400 ribu per paket isi tiga buah keranjang kecil, sedang dan besar.

## Pemkab Bogor Akui Pengendalian Inflasi Melalui OPM Tak Tuntas

**CIBINONG (IM)** - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat, mengakui bahwa program pengendalian inflasi melalui operasi pasar murah (OPM) tidak tuntas karena waktu persiapan untuk melakukannya sangat sempit.

"Itu program dadakan atau kejutan, istilahnya tiba-tiba, dibuat aturan main oleh pemerintah pusat karena menghindari inflasi untuk setiap daerah," kata Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor, Teuku Mulya di Cibinong, Bogor, kemarin.

Menurut Teuku, dari Rp10,5 miliar yang disiapkan untuk operasi pasar murah, pihaknya hanya mampu merealisasikan Rp5 miliar melalui Perusahaan Umum Daerah (Perumd) Pasar Tohaga sebagai pelaksana.

Tauku menyebutkan, tidak maksimalnya realisasi anggaran operasi pasar murah karena instruksi pemerintah pusat yang mendadak di akhir 2022 untuk membuat program pengendalian inflasi dari dana alokasi umum (DAU) tanpa memberikan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. "Arahannya tidak jelas,

juklak juknisnya belum jelas. Kita cari-cari, awalnya untuk BBM. Pertanyaan, kalau misalnya angkotnya kita kasih subsidi, angkotnya tidak siap karena angkotnya ini pribadi bukan yayasan. Makanya ditukar ke operasi pasar, juklak juknisnya juga tidak detail," jelas Teuku.

Sebelumnya, Pelaksana tugas (Plt) Bupati Bogor, Iwan Setiawan mengevaluasi salah satu program penanganan inflasi yakni OPM karena pelaksanaannya dinilai tidak tepat sasaran. "Daftar penerima dari Dinsos (Dinas Sosial) dan mungkin Dinsos kurang sosialisasi dan akan kita evaluasi lagi," kata Iwan.

Ia mengaku segera mengevaluasi perangkat daerah terkait pendistribusian paket sembako murah yang belum tepat sasaran karena pihak kecamatan dan pemerintah desa terpaksa andil dalam pendistribusian paket sembako murah tersebut.

Padahal, tegasnya, sejatinya paket bantuan tersebut harus diterima langsung oleh masyarakat yang sudah terdaftar, bukan oleh pihak kecamatan dan pemerintah desa yang ikut ambil bagian dalam OPM. ● **gio**

# 8 | Nusantara



IDN/ANTARA

### SIMPOSIUM NASIONAL MAJELIS PEMBANGUNAN DAERAH ICMCI

Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Arif Satria (kanan) dan Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) sekaligus Wali Kota Bogor Bima Arya (kiri) berjalan bersama usai membuka Simposium Nasional Majelis Pembangunan Daerah ICMCI di Balai Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (10/1). Simposium Nasional MPD ICMCI tersebut mengambil tema Memperkuat Otonomi Daerah Menuju Indonesia Sejahtera pada 2045.

## Tolak Jadi Cabup Bogor, Mulyadi Lebih Berniat ke Jawa Barat

"Kalau ditugaskan sebagai Calon Gubernur Jawa Barat atau calon wakilnya Ridwan Kamil di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat periode berikutnya, saya mau, karena saya pernah keliling 27 kota dan kabupaten, hingga tau apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Jawa Barat dan apa yang ingin saya perbuat itu sudah ada gambaran," tutur Mulyadi.

**CIBINONG (IM)** - Selain Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan dan Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto, nama kader Partai Gerindra lainnya Mulyadi digadang-gadang bisa

menjadi Calon Bupati Bogor periode 2024-2029.

Namun, Mulyadi yang juga anggota Komisi V dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI tersebut secara tegas menolak

menjadi Calon Bupati Bogor dari Partai Gerindra.

Dia mengaku tak kali ini saja menolak pencalonan Bupati Bogor tersebut. Karena hal serupa pernah dia lakukan juga di Pemilihan Bupati (Pilbup) Bogor Tahun 2018 lalu.

"Tahun 2018 lalu saya menolak permintaan Ketua Umum Partai Gerindra, Letjend TNI (purn) Prabowo Subianto untuk maju menjadi Calon Bupati Bogor. Saya malah menyarankan Iwan Setiawan yang kawan dekatnya Fadli Zon dan juga kader Partai Gerindra untuk menggantikan posisi saya," kata Mulyadi kepada wartawan, Selasa (10/1).

Mulyadi menuturkan, bahwasanya ia sebelumnya juga sudah menolak permintaan Sang Ketua Umum yang ingin memasangkan dirinya dengan

Joko Widodo, saat perhelatan Pemilihan Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017.

"Dulu juga sewaktu dicalonkan sebagai Wakilnya Joko Widodo dan juga sebagai Calon Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) saya tolak karena beberapa alasan. Kalau ditugaskan sebagai Calon Gubernur Jawa Barat atau calon wakilnya Ridwan Kamil atau Kang RK di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat periode berikutnya, saya mau karena dulu ketika menjabat sebagai Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Barat saya pernah keliling 27 kota dan kabupaten, hingga tau apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Jawa Barat dan apa yang ingin saya perbuat itu sudah ada gambaran," tutur Mulyadi.

Walaupun begitu, pria

berusia 52 tahun yang kini menjadi salah satu anggota Dewan Penasehat Partai Gerindra itu menjelaskan, dalam perhelatan demokrasi di daerah, ia tak ingin bersinggungan dengan internal atau sesama kader Partai Gerindra.

Khusus ajang Pilbup Bogor, pria asli Jonggol Kabupaten Bogor ini meyakini Partai Gerindra akan mendedikasikan kader terbaiknya di ajang perhelatan demokrasi tersebut.

"Rudy Susmanto dan Iwan Setiawan saat ini masih jadi kader terbaik kami untuk Kabupaten Bogor, biarkan terjadi beauty contest di tengah masyarakat. Nanti partai akan mendengarkan aspirasi masyarakat Kabupaten Bogor, sebagai salah satu faktor penguatan menjadi Cabup Bogor," tukasnya. ● **gio**

## Presiden Jokowi akan Membuka Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda Se-Indonesia

**BOGOR (IM)** - Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkominda) se Indonesia akan digelar di Kabupaten Bogor, Selasa (17/1) mendatang.

Rakornas tahun ini mengangkat tema penguatan pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi.

Sebelumnya, Rakornas serupa di Kabupaten Bogor, pernah sukses digelar di tahun 2019 lalu.

Rencananya, Rakornas diselenggarakan di Sentul International Convention Center (SICC), Babakan Madang. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo direncanakan akan membuka Ra-

kornas Kepala Daerah dan Forkopimda tahun 2023 itu sekaligus memberikan arahan kepada peserta Rakornas.

Selaku tuan rumah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor hari ini, Selasa (10/1), mengikuti rapat persiapan dan peninjauan langsung venue yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri), Suhajar Diantoro.

Hadir di kesempatan itu, Plt. Bupati Bogor, Iwan Setiawan, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Kapolres Bogor, Dandim 0621 Kabupaten Bogor, Plt. Asisten Administrasi Umum, Kasatpol PP, Camat Babakan

Madang, dan perwakilan Dinas Perhubungan.

Rakornas nantinya akan diisi materi mengenai Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi, Investasi dan Kemudahan Perizinan, Penanganan Covid-19, Stunting, Kemiskinan dan Jaring Pengaman Sosial, serta Stabilitas Politik, Hukum, Keamanan dan Pengawasan, dari para menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II.

Rakornas yang rencananya menghadirkan 2.800 orang, akan ditutup oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, K.H. Ma'ruf Amin, yang juga akan memberikan arahan kepada jajaran Kepala Daerah dan Forkopimda se-Indonesia. ● **gio**



IST

Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pimpinan Daerah dan Forkominda se Indonesia di Bogor. Selasa (10/1) kemarin dilakukan peninjauan langsung ke venue dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Suhajar Diantoro.

## Pemkab Bogor Dukung Penguatan Kapasitas Kecamatan

**BOGOR (IM)** - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mendukung penuh penguatan kapasitas kecamatan dalam memberikan layanan cepat, efektif dan efisien kepada masyarakat, sehingga kedepan diharapkan seluruh kebutuhan masyarakat selesai dilayani di tingkat kecamatan.

Hal tersebut dibahas pada Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Kinerja Kecamatan, di Vila Kebon Asri, Desa Pasir Jaya, Kecamatan Cigombong, Senin (9/1).

Hadir pada Rakor tersebut, Plt. Bupati Bogor, Iwan Setiawan, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Plt. Asisten Administrasi Umum, Inspektur, Kepala Bappedalitbang, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), beserta jajaran Camat se-Kabupaten Bogor.

Camat Cigombong, Irwan Somantri menuturkan, kecamatan adalah salah satu perangkat daerah dimana salah satu kewajibannya menyusun perencanaan. Namun kaitan hal tersebut kewenangannya masih sangat terbatas. Banyak keterbatasan yang kami miliki dimulai dari proses menyusun perencanaan.

"Kami berharap kecamatan diberikan penguatan kapasitas dalam rangka memberikan pelayanan yang cepat, efektif, dan efisien kepada masyarakat. Jadi masyarakat cukup selesai dilayani di kecamatan, tidak perlu harus datang ke dinas, mengingat wilayah Kabupaten Bogor yang sangat luas," tuturnya.

Sementara Camat Ciampela, Yudi Santoso mengatakan, sebetulnya yang lebih utama adalah membangun komitmen secara bersama-sama dalam rangka gerak cepat melayani masyarakat.

"Kita tidak harus meminta kewenangan-kewenangan dari dinas, semuanya masih ada di dinas, tapi segala sesuatu yang bersentuhan dengan masyarakat, Camat punya tang-

gung jawab dan bersama-sama dengan dinas lebih responsif menyepakati hal tersebut," kata Yudi.

Aspirasi para Camat tersebut disambut baik oleh Plt. Bupati Bogor, Iwan Setiawan. Menurut Iwan Setiawan, dirinya sangat setuju jika wacana kecamatan dengan kewenangan yang lebih luas.

Di antaranya pelimpahan kewenangan pemeliharaan infrastruktur, trantibum, kewenangan di bidang pendidikan, olahraga dan kebudayaan. Asalkan pelimpahan kewenangan ini dilaksanakan sesuai kemampuan dan SDM yang mendukung kegiatan.

"Di Jepang kewenangan lebih luas diberikan kepada pemerintahan setingkat kecamatan, semua kewenangan pelayanan publik secara parsial diberikan seluruhnya ke pihak kecamatan," ungkap Iwan.

Di kita, lanjut Iwan Setiawan, dasar hukumnya sudah ada untuk memberikan kewenangan lebih kepada kecamatan, saya mendukung kewenangan Camat diperkuat karena langsung bersentuhan dengan masyarakat di wilayah. Camat juga lebih mengetahui permasalahan yang ada di wilayahnya masing-masing. Ini juga demi memutus rantai birokrasi yang panjang dan rumit. "Arahnya ke depan, kecamatan adalah miniatur Pemda, namun tetap berdasarkan kajian kewenangan yang akan diberikan. Pada intinya penataan kewenangan ini untuk percepatan dan efektivitas pelayanan organisasi kepada masyarakat," papar Ade.

Ade menambahkan, rancangan kebijakan ini harus segera dibahas oleh tim pengkajian penataan organisasi. Tim akan mengkaji isi kewenangan yang bisa dilimpahkan ke kecamatan, dasar hukumnya di antaranya Kepmendagri 50 tahun 2021. Namun, APBD 2023 sudah ditetapkan, kemungkinan bisa dikejar di APBD perubahan tahun 2023. ● **gio**